

BAB III

TINJAUAN TEORITIS PERPOLITIKAN DI INDONESIA

A. Politik

1. Pengertian politik

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu (*polis*) yang artinya “negara kota” dan Aristoteles (384-322 S.M). merupakan orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang “manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik”. Dengan itu ia menjelaskan, hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat hal ini sebagai kecendrungan alami dan tak dapat dihindarkan oleh manusia dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya daripada bekerja sama dengan orang lain. Dalam pengertian yang luas ini, setiap orang adalah politisi atau makhluk politik (*zoon politicon*).

Dalam beberapa literatur ilmu politik ternyata memiliki bermacam-macam arti mengenai politik. pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut

proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. *Pengambilan keputusan (decision making)* mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan *kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policies)* yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau *alokasi (allocation)* dari sumber-sumber dan *resources* yang ada¹.

Ilmu politik secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang politik. Plato dan Aristoteles menamakan politik sebagai *En dam onia* atau *the good life*. Penamaan ini memiliki maksud bahwa politik bertujuan untuk melindungi dan mencapai sebuah tujuan masyarakat yang sejahtera. Harold laswell dan david easton merumuskan bahwa politik sebagai *the authoritative allocation of values for a society* atau alokasi nilai-nilai secara otoritatif, berdasarkan kewenangan, dan untuk sebuah masyarakat.²

¹ M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (LP2M Uin Smh Banten, 2018),...h.1-2.

² Yusa Djuyandi, , *Pengantar Ilmu Politik Edisi Kedua*, (Depok: Rajawali Peers, 2017),...h.3.

2. Konsep-konsep politik

a. Negara

Mengapa sebuah (negara) kota lahir dalam peradaban sejarah, Bagaimana proses dan kekuatan-kekuatan sejarah apa sajakah yang membidangi kelahirannya, Teoritisi dan sejarawan sosial lainnya, lewis mumford dalam *the city in history* mengungkapkan bahwa tidak ada jawaban tuntas yang mampu menjelaskan pertanyaan-petnyaan itu karena tidak adanya penjelasan tunggal yang mencakup seluruh transformasi sebuah kota, mulai dari ketika ia hanya merupakan nukleus sosial embrionik hingga fenomena yng kompleks. Bagi mumford, kelahiran dan perkembangan sebuah (negara) kota tetap masih merupakan misteri tak terpecahkan.

Menurut sejarawan lain, max dimont mengungkapkan bahwa kota tertua di dunia adalah jericho (jerusalem). Setelah itu Cairo, Babilonia, Memphis, Alexandria, Mohenjodaro dan Harappa dan beberapa kota lainnya di kawasan Midertania.

Sekitar abad V.sm jauh sebelum kelahiran yesus dari nazareth, di yunani timbul kota-kota yang dalam sejarah pemikiran politik barat dikenal sebagai negara-negara kota (yunani: polis,

inggris: city states). Negara kota kuno di masa itu terbentuk karena terjadinya interaksi intensif antara peradaban Lona, Mesir kuno dan Mesopotamia maupun Babilonia yang memiliki tradisi besar dengan minoritas sosial kreatif di kawasan Yunani kuno yang memiliki tradisi kecil.

Negara, menurut Miryam Budiardjo, adalah alat dari masyarakat, yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara memiliki kapasitas untuk membentuk dan mengontrol kehidupan individu dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Oleh karena itu, negara menstrukturisasi hampir semua fenomena dalam masyarakat.

Dengan demikian, tugas negara adalah *pertama*, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan; *kedua*, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seuruhnya. Di telisik dari fungsinya, negara berfungsi, yaitu untuk melaksanakan penertiban

(law and order), mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, dan menegakkan keadilan³.

b. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Menurut Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam *power and society*: “ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”. Sedangkan W.A.Rogson dalam *the university taching of social sciences*:” ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat... yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Menurut ossip K. Plech Theing dalam *fundamentals of political Science*: “ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara meruakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat mempengaruhi negara”. Flachtheim juga menekankan bahwa kekuasaan politik dan tujuan politik mempengaruhi satu sama lain dan bergantung satu sama lain.

³. M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (LP2M Uin Smh Banten, 2018),...h.7-9.

Teori kekuasaan menurut Miryam Budiardjo, yaitu kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan merupakan alat pemaksa dan mempunyai akibat fisik; otoritas juga dapat di dasarkan atas persetujuan dan masih lebih efektif.

Kekuasaan yang di deskripsikan oleh Jeffray A. Winters dalam bukunya *oligrki*, bahwa kekuasaan adalah konsep yang sukar di definisikan. Definisinya berubah tergantung keadaan. Kadang kekuasaan berpengaruh bukan karen digunakan, tapi pihak lain mengantisipasi penggunaannya⁴.

c. Pengambilan Putusan

Keputusan (*decision*) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan (Decision Making) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Di sisi lain, keputusan adalah keputusan yang mengikat, menyangkut, dan memengaruhi masyarakat umum.

⁴ M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*,...h.12-13.

Hal-hal yang menyangkut, dan memengaruhi masyarakat umum biasanya di urus dan di selenggarakan dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, keputusan politik dapat pula di pahami sebagai pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah.

Menurut Joice Nitchell, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya (*politices is collective decision making or the making of pulbich policies for an entire society*). Karl W. Deutch juga mengartikan bahwa politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang di maksud adalah keputusan mengenai tindakkan umum atau nilai-nilai (*pulich boods*), yaitu mengenai apa yang akan di lakukan dan siap mendapat apa.

Alternatif keputusan politik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu program-program prilaku untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat negara (kebijakan umum), dan orang orang yang akan menyelenggarakan kebijakan umum (pejabat pemerintah). Dengan demikian, kebijakan umum merupakan bagian dari keputusan politik. Sementara itu, kputusan tidak selalu menyangkut politik,

melainkan keputusan dapat menyangkut diri sendiri, keluarga, kelompok atau golongan, dan pembangunan sumber daya manusia.

d. Kebijakan Umum (*public policy*)

Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang di ambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Menurut David Easton, ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum. Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk suatu masyarakat untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat.

Ciri khas kebijakan umum sebagai produk tindakan pemerintah ialah sifatnya yang mengikat, dalam arti pelaksanaannya di tegakkan dengan kewenangan memaksakan secara fisik yang di monopoli oleh pemerintah. Ke-empat tipe kebijakan umum itu ialah Regultif, Redistributif, dan konstituen.

Pertama, kebijakan regulatif terjadi apabila kenijakan mengandung paksaan dan akan di terapkan secara langsung terhadap individu. Biasanya kebijakan regulatif di buat untuk mencegah agar individu tidak melakukan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan, seperti Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang anti monopoli dan kompetisi yang tak sehat, dan berbagai ketentuan yang menyangkut keselamatan umum.

Kedua, kebijakan redistributif ditandai dengan adanya paksaan secara langsung kepada earga negara, tetapi penerapannya melalui lingkungan. Penggunaan pajak secara progresif kepada seluruh orang yang termasuk kategori wajib pajak untuk memberikan manfaat kepada orang lain melalui berbagai program pemerintah merupakan inti kebijakan redistributif.

Ketiga, kebijakan distributif ditandai dengan pengenaan paksaan secara tidak langsung (kemungkinan pengenaan paksaan fisik sangat jauh), tetapi kebijakan itu di terapkan secara lansung secara individu. Individu dapat menarik manfaat dari kebijakan itu, walaupun tidak di kenakan paksaan keada individu untuk menggunakannya.

Keempat, kebijakan konstituen di tandai dengan kemungkinan pengenaan paksaan fisik yang sangat jauh, dan

penerapan kebijakan itu secara tidak langsung melalui lingkungan. Walaupun tipe keempat ini merupakan konsekuensi logis dari tipe sebelumnya, sebenarnya tipe ini merupakan kategori sisa (*residual category*) yang mencakup tipe-tipe lain yang tidak dapat dimasukkan ke dalam tiga tipe sebelumnya.

e. Pembagian (*Distribution*)

Yang dimaksud dengan pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*) ialah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat. Para ilmuwan beranggapan bahwa politik adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara megikat. Yang tekankan oleh mereka bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu di teliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah⁵.

3. Sistem politik

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungan dan memiliki hubungan yang

⁵ M. Zainor Ridho. *Pengantar Ilmu Politik*,...h.18-21.

relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (*input*) kedalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (*output*). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan public yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektivitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Ditambah

juga bahwasanya tidak jarang efektivitas sistem politik diukur dari kemampuan seseorang untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter⁶.

Konsep sistem politik merupakan pokok dari gerakan pembaharuan yang timbul dalam dekade lima puluhan. Gerakan ini ingin mencari suatu “new science of politics” ada lebih terkenal dengan istilah *pndekatan tingkah laku* oleh karena mengemukakan ”tingkah laku politik” sebagai fokus utama dari penelitian, dan terutama menekankan struktur dan fungsi tingkah laku.

Pada dasarnya konsep sistem politik dipakai untuk keperluan analisa, dimana suatu sistem bersifat abstrak pula. Dalam konteks ini sistem terdiri dari beberapa variabel. Disamping itu konsep sistem politik dapat diterapkan pada suatu situasi yang konkrit, misalnya negara, atau kesatuan yang lebih kecil seperti kota atau suku bangsa. Ataupun kesatuan yang lebih besar seperti dibidang internasional, dimana sistem politik terdiri dari beberapa negara.

⁶ Wikipedia.org/Wiki/Sistem_Politik/,diakses pada tanggal 03 juni 2021, pada pukul 19:30 WIB

Sistem politik ini hanya merupakan salah satu dari berbagai macam-macam sistem yang terdapat dalam suatu masyarakat, seperti misalnya sistem ekonomi, sistem teknik dan sebagainya. Setiap sistem masing-masing mempunyai fungsi tertentu yang dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Sistem-sistem ini merupakan *lingkungan (environment)* dari sistem politik.

Dalam konsep sistem politik ini kita temukan istilah-istilah seperti proses, struktur dan fungsi. Proses adalah pola-pola (sosial dan politik) yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Pola-pola ini ada yang jelas kelihatan, ada pula yang kurang jelas tampak. Dalam suatu negara, lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, birokrasi, sekalipun sudah mempunyai kehidupan sendiri.

Seperti telah diterangkan diatas, sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan (policy decisions) yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai (baik yang bersifat materil, maupun yang non materil). Keputusan-keputusan kebijaksanaan ini diarahkan kepada tercapainya tujuan-

tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan “output” yaitu keputusan-keputusan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengikat. Dengan kata lain: melalui sistem politik tujuan-tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan.

Sistem politik tersebut sebagai “sistem terbuka” (open system) oleh karena terbuka untuk pengaruh dari luar sebagai akibat dari interaksi dengan sistem-sistem lain. Maka dari itu seorang sarjana ilmu politik harus mampu untuk melibatkan aspek-aspek non politik dari kehidupan sosial dalam penelitiannya.⁷

4. Perkembangan politik

Perkembangan ilmu politik di Indonesia dapat ditelaah dari munculnya kerajaan-kerajaan dinusantara, seperti kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat yang bercorak Hindu Budha (Abad ke-4 hingga Abad ke-7), kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang berkembang pesat pada abad ke-7 hingga abad ke-14, serta kerajaan Majapahit di Jawa Timur (abad ke-14), maka perkembangan usia politik di tanah air sudah sangat tua bahkan jauh lebih tua dari usia kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

⁷ Miryam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003),...h.46-48.

Ilmu politik melihat dan menganalisis bagaimana keberadaan kerajaan-kerajaan di nusantara tersebut menggambarkan cerminan sebuah *polis* seperti yang terdapat di Yunani, dimana didalamnya terdapat penguasa (pemerintah), masyarakat, dan wilayah dengan batas-batas tertentu. Ilmu politik mempelajari bagaimana kekuasaan dijalankan oleh Raja selaku pemimpin untuk mengatur masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi tertib dan meleakukan usaha dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dibeberapa negara maju, seperti Inggris, Amerika Serikat, Belanda, dan negara lainnya ilmu politik telah berkembang dengan begitu pesat sehingga telah dilakukan beberapa penelitian oleh para ilmuan untuk dapat mengembangkan disiplin ilmu politik.

Di Indonesia sendiri ilmu politik sudah banyak mendapat perhatian dari masyarakat dan dalam perkembangannya berusaha untuk menganalisis fenomena politik, baik secara nasional maupun internasional. Khususnya pada era reformasi saat ini ilmu politik menjadi sebuah disiplin ilmu yang penting untuk dipelajari di beberapa perguruan tinggi karena menyangkut banyak aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara⁸.

⁸ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik* Edisi Kedua, ...h.8-9.

Sejak awal kemerdekaan hingga awal reformasi tahun 1998 politik di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Misalnya, Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal, kemudian sistem itu diubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer atau biasa disebut dengan demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal ini membawa akibat nan cukup besar, mempengaruhi keadaan, situasi dan kondisi politik pada waktu itu. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945.

Pada awal kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih menari bentuknya. Hal ini ditandai dengan pembentukan struktur pemerintahan, perubahan bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), serta perubahan bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan. Pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai masalah ekonomi, seperti beban ekonomi dan keuangan yang harus ditanggung oleh Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut tentu saja membawa pengaruh terhadap perkembangan

politik di Indonesia. Berikut ini perkembangan politik di Indonesia sejak awal kemerdekaan.

1. Perkembangan Politik pada awal Kemerdekaan
 - a. UUD 1945 ditetapkan dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sehingga Indonesia memiliki landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara.
 - b. Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia.
 - c. Pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945, diputuskan pembagian 8 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi, dan daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.
 - d. Pembentukan kementrian sebagai berikut: Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum.

- e. Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI membentuk KNPI yang bertugas menjalankan pengawasan GBHN.
 - f. Tanggal 23 Agustus, presiden Soekarno mengesahkan BKR dan pada Tanggal 5 Oktober, dibentuk tenara nasional yang disebut dengan TKR.
2. Perubahan menjadi RIS
- a. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 Nopember 1949 dilaksanakan KMB di Den Haag, Belanda mengakui Indonesia secara formal kedaulatan penuh negara Indonesia.
 - b. Negara bagian meliputi negara indonesia timur, negara pasundan, negara jawa timur, negara sumatra, negara sumatra timur, dan republik indonesia.
 - c. Satuan kenegaraan meliputi kalimantan barat, kalimantan timur, banjar, dayak besar, bangka, belitung, riau dan jawa tengah.
 - d. Daerah suap raja meliputi kota waringin, subang dan padang.
 - e. UUD republik indonesia serikat atau konstitusi RIS. Selam berlakunya konstitusi RIS 1949, Uud 1945 tetap berlaku, tetapi hanya untuk negara bagian republik indonesia.

3. Kembali ke negara kesatuan.
 - a. Pada awal bulan Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dari negara RIS sehingga hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatra Timur.
 - b. Piagam persetujuan tanggal 19 Mei 1950 muncul kesepakatan antara RIS yang mewakili negara Indonesia Timur dan negara Sumatra Timur dengan Republik Indonesia untuk itu dibentuklah UUDS 1950.
 - c. Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1. Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal Dan Demokrasi Terpimpin

1. Pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal
 - a. Indonesia menganut sistem demokrasi liberal (1950-1959) dengan pemerintahan parlementer.
 - b. Pada masa demokrasi liberal ini, terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Yaitu (1). Kabinet Natsir, September 1950 sampai Maret 1951, (2). Kabinet Sukiman, April 1951 sampai

februari 1952, (3). Kabinet wilopo, April 1952 sampai juni 1953, (4). Kabinet Ali Sastro Amidjojo I, juli 1953 saampai juli 1955, (5). Kabinet burhanudin harahap, agustus 1955 sampai maret 1956, (6). Kabinet Ali Sastro Amidjojo II, maret 1956 sampai maret 1957, (7). Kabinet djuanda, maret 1957 sampai juli 1959.

2. Pemilu 1955

- a. Persiapan pelaksanaan pemilu di lakukan sejak masa kabinet Ali Sastro Amidjojo I, pada masa kabinet ini, dibentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada tanggal 31 mei 1954.
- b. Pada tanggal 29 september 1955, dilaksanakan pemili DPR yang berjumlah 272 orang, pemilu di menangkan oleh empat partai politik, yaitu: PNI, MASYUMI, NU, dan PKI.
- c. Pada tanggal 15 desember 1955 dilaksanakan pemilu anggota dewan konstituante sebanyak 520 orang anggota dewan ini di lantik pada tanggal 10 november 1956.

3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

- a. Pengertian kabinet dalam waktu singkat menjadikan keadaan politik menjdi tidak setabil.

- b. Pada tanggal 5 juli 1959, presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi dibubarkannya konstituente, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; dibentuknya MPRS dan DPAS.
- c. Berlakunya kembali UUD 1945 melalui dekrit presiden 5 Juli 1959 maka berakhirilah demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin, demikian pula mulai saat itu, sistem kabinet parlementer di tinggalkan dan diganti menjadi kabinet presidensial.
- d. Pada perkembangannya, pada masa demokrasi terpimpin, justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 1945 pemerintah cenderung menjadi sentralistik karena terpusat pada presiden.
- e. Sistem penmerintahan pada masa demokrasi terpipin memberi peluang PKI untuk memperkuat posisinya di segala bidang sehingga PKI megadakan pemberontakan yang dikenal G30S PKI.
- f. Peristiwa G30S PKI dan melambungnya harga barang-barang pokok memicu terjadinya demonstrasi dan kekacauan di berbagai tempat.

2. Perkebangan Politik Pada Masa Orde Baru

1. Pembubaran PKI dan organisasi massanya
 - a. pada tanggal 12 maret 1966, soeharto mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormasnya yang beraktifitas di wilayah indonesia.
 - b. pada tanggal 18 maret 1966, letjen soeharto mengamankan 15 orang menteri yang di nilai terlibat dalam G30S PKI.

2. Penyederhanaan partai politik
 - a. Pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai politik yang didasarkan pada kesamaan program
 - b. Tiga kekuatan sosial politik pada orde baru adalah sebagai berikut: *partai persatuanpembangunan, partai demokrasi indonesia, dan golongan karya.*

3. Pemilihan umum

Selama masa orde baru, pemerintah berhail melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

a. Peran ganda (dwi fungsi) ABRI

Pada masa pemerintahan orde baru, pemerintah memberikan peran ganda ABRI yang di kenal denga sebutan dwi

fungsi ABRI. ABRI berperan dalam hankam dan mengatur negara. Abri di izinkan memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya.

3. Perkembangan politik pada masa reformasi

1 Reformasi Politik

- a. Pada tahun 1998, masa pemerintahan orde baru berakhir ditandai dengan mundurnya presiden Soeharto dari jabatan presiden republik Indonesia, dan dimulailah orde Reformasi.
- b. Pembentukan dibidang politik, antara lain sebagai berikut: 1). Reformasi dibidang ideologi negara dan konstitusi. 2). Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD sebagai wujud kedaulatan rakyat. 3). Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet. 4). Memberdayakan partai politik untuk menegakan kedaulatan rakyat. 5). Penyelenggaraan pemilu, dan 6). Birokrasi sipil mengarah kepada terciptanya institusi birokrasi yang netral, profesional, dan memihak. 7). ABRI berkonsentrasi pada fungsi hankam. 8). Memberdayakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi.

2 Pemilu

- a. Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung.
- b. Pemilu legislative adalah pemilu untuk memilih patai politik dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap pertama ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004.
- c. Pemilu presiden putaran pertama untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung.
- d. Pemilu presiden putaran kedua dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan paling tidak 50% pada putaran pertama.
- e. Pemilu presiden tahun 2004 diikuti oleh lima pasangan calon presiden dan Soesilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden yang ke-6 Indonesia dan dilantik pada 20 Oktober 2004.
- f. Tahun 2009 dilaksanakan pemilu yang diikuti 38 parpol dan partai demokrat unggul dengan 20,85% suara⁹.

⁹ <https://familiarusdiantiblog.wordpress.com/artikel/perkembangan-politik-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021, Pukul 20.00 WIB

B. Tokoh-Tokoh politik di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang hebat, besar dan makmur. Banyak negara-negara lain yang belajar dari Indonesia dari segi positif. Hingga kini banyak tokoh politik Indonesia terkenal di mata dunia. Bukan hanya satu atau dua tokoh politik yang terkenal, mungkin puluhan tokoh politik sejak zaman sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan yang di segani di dunia.

1 Soekarno

Seperti kita ketahui bersama, Bung Karno merupakan tokoh proklamator Indonesia yaitu orang yang pertama yang mengumumkan berakhirnya penjajahan Jepang atas Indonesia pada tahun 1945. Bung Karno bersama-sama Bung Hatta dan tokoh lainnya merupakan tokoh yang terkenal pada zaman kemerdekaan Indonesia.

Setelah proklamasi Bung Karno menjadi pemimpin Indonesia sebagai Presiden yang pertama kalinya. Era kepemimpinan Bung Karno, Indonesia dikenal sebagai Negara anti Barat. Saat itu sebagai presiden, Bung Karno berhasil mengangkat martabat Indonesia di mata dunia. Pernah suatu ketika Indonesia keluar dari

keanggotaan PBB karena beberapa kebijakan PBB tidak sesuai hati nurani Bung Karno.

2 Muhammad Hatta

Inilah tokoh di balik layar dan di belakang Bung Karno. Bung Hatta setia mendampingi Bung Karno saat pertama proklamasi hingga menjadi wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Dunia harus mengakui kehebatan Indonesia dibawah kepemimpinan Bung Karno dan Bung Hatta.

Bung Hatta banyak menghabiskan waktu di dalam negeri dan bekerja dibalik layar. Dunia seakan lupa Indonesia mempunyai tokoh yang hebat dan luar biasa di dalam sosok Bung Hatta.

3 Soeharto

Sebagai penerus tongkat kepemimpinan dari Bung Karno, Soeharto mempunyai tugas dan tanggung jawab besar untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara makmur. Dimasa kepemimpinan Soeharto Indonesia dikenal sebagai pengekspor beras, hal ini karena program swasembada beras pemerintah berjalan dengan lancar. Hingga tahun 1998 Bapak Jendral bintang

lima Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun lamanya memimpin Indonesia, alesannya karena polemik yang terjadi saat itu.

4. B.J Habibie

Burhanuddin Jusuf Habibie atau yang kerap disapa Bapak B.J Habibie merupakan seorang putera Indonesia yang sukses mengharumkan nama bangsa dan negara dikancah dunia dibidang penerbangan.

Mengenyam pendidikan disalahsatu Universitas terkemuka di Jerman, B.J Habibie enerapkan konsep ciptaannya dipenerbangan (Pesawat). Tidak ada saat itu ilmuan dan profesor yang bisa mengerjakan hal yang sama seperti B.J Habibie.

Pasca pengunduran Suharto, B.J Habibie menggantikannya untuk naik pangkat menjadi presiden republik Indonesia yang ketiga. Tidak lama masa B.J Habibie menjabat presiden yaitu selama dua tahun dan digantikan oleh Gusdur.

Sosok B.J Habibie yang terkenal dan hebat baik di dunia penerbangan dan tokoh politik diangkat ke film layar lebar dengan judul Ainun dan Habibie.

5. Susilo Bambang Yudhoyono

Diera milenium yaitu setelah tahun 2000 Indonesia memiliki sosok yang gagah di dalam diri Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum menjadi presiden republik Indonesia selama dua periode bapak SBY begitu spanya merupakan jendral bintang empat TNI dan jabatan terakhir sebelum menjadi presiden yaitu menjadi menteri koordinator politik dan Keamanan (Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri), mengundurkan diri 11 Maret 2004.

Sosok SBY yang dikenal sangat berwibawa sukses mencuri perhatian publik saat pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden pada Tahun 2004 (Era Demokrasi). Hingga akhirnya SBY keluar sebagai pemenang demokrasi untuk menjadi presiden Indonesia ke-6. Tahun 2009 SBY masih menunjukkan sosok kepemimpinan yang patut dipilih untuk menjadi presiden Indonesia periode yang ke-2.

6. Prabowo Subianto

Siapa yang tidak mengenal sosok Prabowo Subianto. Walaupun kalah dalam pertarungan pilpres tahun 2014, sosok Prabowo ternkenal sebagai tokoh yang anti barat, bagaimana tidak, samapai-sampai amerika Serikat membekukan pisa kunjungan Prabowo ke Negri tersebut.

Sebelum mendirikan Partai Gerindra, Prabowo pernah menjadi pucuk pimpinan kopasus. Kalah dalam pertarungan pilpres 2014 tidak menghentikan langkah Prabowo untuk membangun Indonesia. Prabowo terus mengawal kinerja Pemerintah sebagai oposisi dan bekerjasama dengan pemerintahan presiden Joko Widodo.

7. Joko Widodo

Sebelum menjabat Presiden RI yang ke-7. Jokowi begitu sapaan akrabnya pernah menjadi Walikota solo dan juga menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sosok yang dikenal dengan gaya khasnya berhasil memenangkan pesta demokrasi Indonesia tahun 2014. Hingga Tahun 2019 Bapak Joko Widodo akan menjadi nahkoda Bangsa Indonesia. Sebagai rakyat kita banyak berharap dari Jokowi untuk membawa Indonesia maju dan bermartabat.

Posisi dan pemikiran mereka sangat berpengaruh untuk indonesia. Emang indonesia masih memiliki banyak tokoh-tokoh politik lain yang berpengaruh selain yang dipaparkan diatas¹⁰.

¹⁰<https://www.kompasiana.com/irsyad17876/6bfd6de712ae94379265ce33/7-tokoh-politik-indonesia-yang-terkenal-hingga-mendunia>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021, pukul 08.00 WIB

C. Sistem Politik Indonesia

Dalam memahami suatu sistem politik, terlebih dahulu kita harus menghayati interaksi fungsional yang menerangkan adanya suatu proses arus yang berputar dalam rangka menjaga keberadaan sistem politik itu sendiri. Menurut Rusadi Kantaprawira (2006:160) menjelaskan bahwa “sistem politik sebagai suatu sistem yang terbuka, dikelilingi oleh lingkungan”. Dalam lingkungan itu sendiri terdapat adanya sejumlah tentang serta tekanan; karena itu suatu sistem politik diharapkan dapat menjawab dan menyaksikan masalah sehingga sistem politik itu bias dikatakan berhasil dalam implementasinya.

Menurut Herbert G. Hicks (1972:464) menjelaskan bahwa “proses politik yang tidak henti-hentinya berputar, yaitu antara lain: dari masyarakat ke pemerintah dan sebaliknya, harus dilihat sebagai suatu kenyataan, seperti juga pengaruh dari luar masyarakat terhadap sistem politik”. Oleh sebab itu, pembangunan sistem politik merupakan suatu proses pengaturan komponen-komponen dalam praktek kehidupan politik, yang pada akhirnya mencapai suatu keadaan yang stabil atau mencapai keadaan yang equilibrium

yang dinamis; artinya sistem politik masih tetap responsif terhadap keadaan perkembangan sistem politik akan tetapi terjadi, walaupun suatu sistem politik sudah mencapai suatu kestabilan.

Secara teori, untuk mengerti proses politik sebagai suatu sistem politik yang ada menampilkan dan menggambarkan kehidupan politik, dimana didalamnya memiliki penempatan nilai yang otoritatif, bias menggunakan *approach teory* yang terigretasi. Pengkajian dengan satu metode atau pendekatan saja akan berjumlah dapat memadai untuk menjelaskan seluruh masalah kehidupan politik yang terjadi, diantaranya: pendekatan tentang kehidupan kepartaian, pendekatan secara parsial, dan pendekatan sosiologis.

Dengan menggunakan pendekatan secara integratif (*general systems theory*), dengan beberapa pendekatan dalam mengkaji suatu peristiwa di dalam sistem politik akan diperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai proses pendewasaan politik akan diperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai proses pendewasaan politik dimasa yang akan dating, yang juga sangat tergantung pada lingkungan dan kekuatan-kekuatan dari sistem

politik itu sendiri, serta sangat dipengaruhi pula oleh pelaku-pelaku politik dalam berpolitik. Disini juga menjelaskan bagaimana satu variabel akan terikat dengan variabel lainnya dalam kerangka kerja dalam sistem politik¹¹.

¹¹Fadhillah Harnawansyah, *Sistem Politik Indonesia*(,Scopindo Media Pustaka,2020),...h.90.

